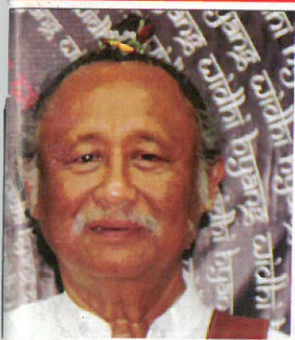


Edisi 21/ Th.2/ Nopember 2016

wartam

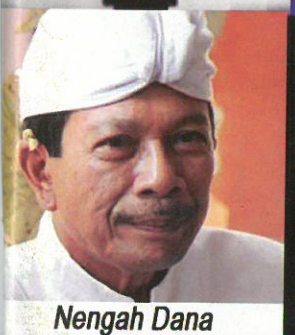
berpikir, berkata, berbuat dharma



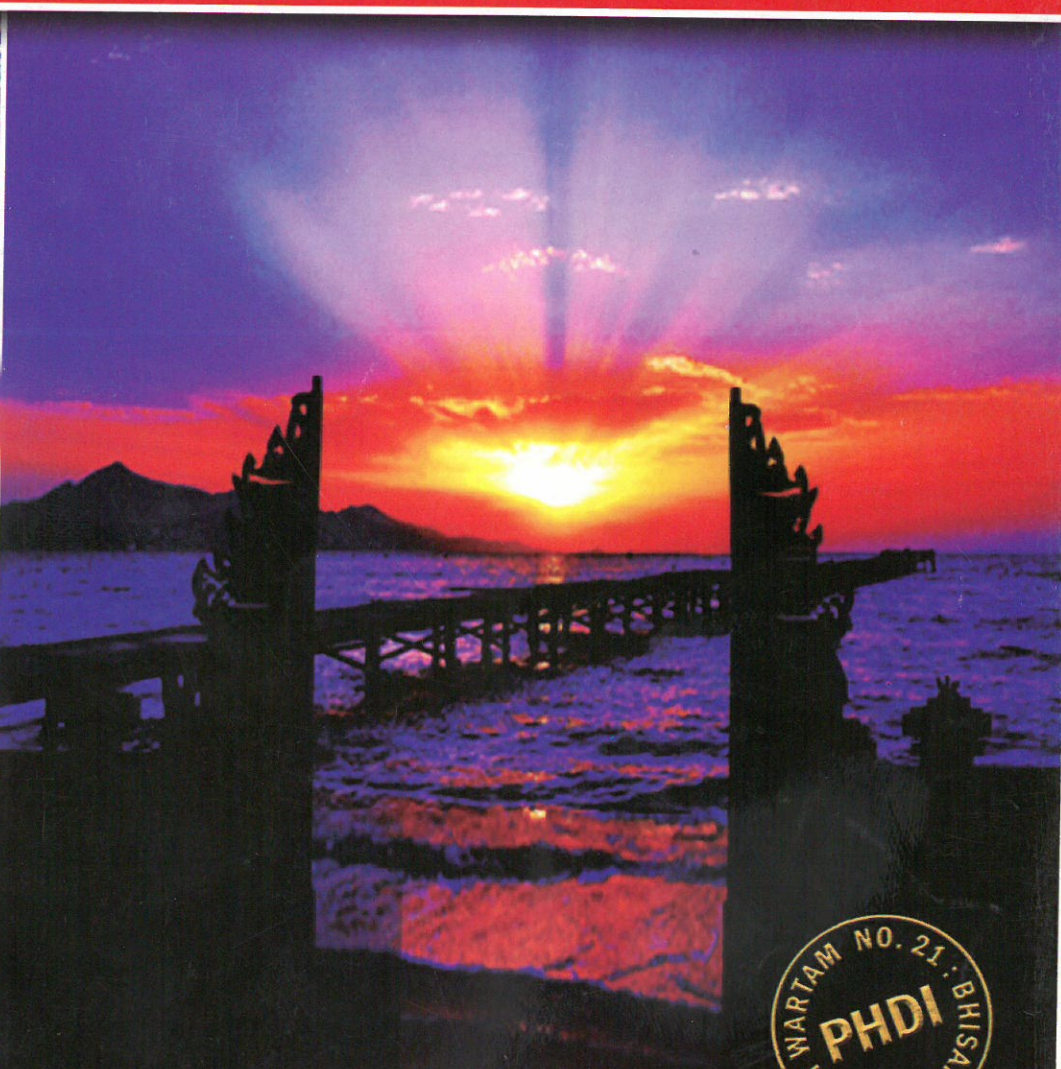
Ida Pedanda Bang Buruan



Wisnu Bawa Tenaya



Nengah Dana



....Manggala Baru Paradigma Baru

ISSN 2442-6911
9 772442 1891009
21/2/11/16 RP.15.000,-

Wawanrasa dengan Ida Pedanda Bang Buruan, Wisnu Bawa Tenaya, Nengah Dana **Menuju Hindu Bhawantu**

PHDI : dulu, kini dan nanti

Tiga sahs PHDI hasil Mahasabha XI sudah terpilih. “Kabinet Baru” untuk Sabha Pandita, Sabha Walaka, Pengurus Harian juga sedang disiapkan. Surabaya menghadirkan banyak kejutan, terutama Bawa Wisnu Tenaya (BWT), nama anyar yang meskipun jauh sebelum Mahasabha digelar, inisial ini sudah santer terdengar. Beberapa spanduk berukuran jumbo yang memampang wajahnya menjadi saksi yang dapat ditafsir liar. BWT tentu bukan orang asing karena pernah menjadi Pangdam Udayana, tapi tetap saja tak begitu populer, terutama ketika diamanatkan menjadi Ketua Umum PHDI. Tugas baru ini agak kurang beririsan dengan kiprahnya selama ini sebagai prajurit yang separuh hidupnya dihabiskan di medan perang. Namun apa boleh bikin, ibarat band musik, BWT akan menjadi vokalisnya. Lampu sorot akan mengarah kepadanya karena ia akan selalu berada di *front stage*.

Lakon Mahasabha di Kota Pahlawan juga masih menyisakan kegundahan. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai Mahasabha terburuk yang pernah diselenggarakan PHDI. Ternyata, adab seperti ini masih belum berubah, dan makin menegaskan umat Hindu, terutama di banyak institusinya selalu awam manajemen modern dan tertib administrasi. Belum lagi mentalitas yang

cenderung saling menegasi, imperior, dan gemar *mekrimikan*. Cerita minor tentang kegiatan rutin yang seharusnya selalu lebih baik tiap lima tahun, menjadi alarm bahwa umat Hindu (baca: kita) masih belum matang dan dewasa dalam berorganisasi.

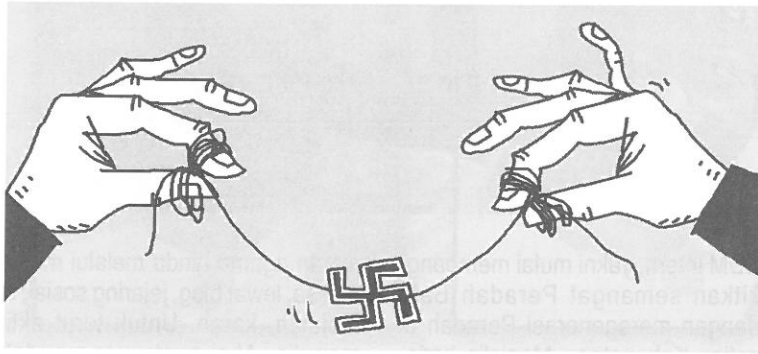
Betul bahwa Hindu dan PHDI akhirnya diakui resmi negara adalah sebuah perjuangan panjang, berat dan melelahkan. Namun kita tidak selayaknya hanya berhenti sampai di sini, merasa berjasa dan menonton saja riak-riak perjalanan Hindu di Indonesia. Nostalgia dan romantisme ini kita sudahi dulu. Percayalah sejarah itu tak akan ke mana. Tidak perlu terlalu bersemangat mengembalikan masa kini ke masa lalu, *len sodan len prani, len pidan len jani*. Tanpa meninggalkan jejak sejarah masa lalu, kita memerlukan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah keumatan yang terus berubah, dinamis dan semakin kompleks.

Sebagai mantan panglima militer, BWT tentu memiliki *grand strategy* sehingga berani mengambil resiko besar menjadi Ketua Umum PHDI. Yang paling dekat adalah memastikan bahwa PHDI bukan ormas keagamaan, tempat hanya berkumpulnya dua-tiga orang, tetapi majelis umat tertinggi yang sejajar dengan majelis umat lain yang sudah berlari kencang. Bukan hanya organisasinya yang besar dan

modern, SDM yang *qualified* tetapi juga kandungan “nutrisinya” yang melimpah. Mereka itu, sebut saja salah satunya MUI bisa meninggikan kualitas umatnya karena Organisasi, SDM, dan Anggaran. Ketiga hal ini sangat sehat dan bertenaga.

Saat ini dan masa yang akan datang, PHDI dihadapkan sejumlah masalah baik lokal, nasional hingga global. Umat masih menaruh harapan besar agar PHDI bisa hadir di tengah umat di seluruh pelosok Nusantara, bukan hanya sebagai penerang *sraddha* dan *bhakti* tetapi juga *problem solver*, tentu sesuai kapasitas dan proporsional. Dengan jumlah dan persebaran umat yang sporadis, PHDI diharapkan berhitung untuk memastikan diri hadir memberi rasa nyaman kepada umat Hindu. Kadang, mereka yang dipedalaman, diperbatasan, di pulau terluar, tidak meminta apa-apa, karena mereka sadar PHDI bukan lembaga berpunya. Mereka cukup didatangi karena itu sudah wujud *simakrama* sebagai sesama umat Hindu. Setidaknya, mereka masih dianggap saudara. Ini baru contoh kecil.

Melanjutkan tulisan edisi sebelumnya (lihat “Menunggu Datangnya Godot”), setidaknya ada tiga hal pokok yang bisa menjadi *guidance* bagi PHDI. *Pertama*, kepengurusan yang



professional. Sudah jamak kita tahu kalau PHDI selama ini banyak diisi oleh mereka yang tidak punya banyak waktu, bekerja sambil lalu, sibuk sendiri, atau mungkin yang paling tidak bagus para *job seeker*, bukan mengumpulkan uang, tetapi memanfaatkan akses, mencari pengakuan, memiliki prestise, membuka kesempatan hingga hanya menambah daftar panjang di Curriculum Vitae. Kita tidak mau (lagi) PHDI diisi oleh nama-nama simbolik tetapi yang bekerja keras dengan upah karena kepantasan dan profesionalitasnya, maupun yang memang tulus mengajukan diri, *lascarya ngayah*, dan ini pasti langka. Model pengurus yang mulai punah.

Kedua, program dan kegiatan yang tidak perlu banyak dan bombastis. Bisa saja sedikit tetapi adalah program skala prioritas, spesifik, dapat dilaksanakan, target jelas, hasilnya konkrit, berdaya guna dan tepat sasaran.

Dalam manajemen, cara-cara ini dapat menggunakan model SMART, yaitu *specific, measurable, attainable, realistic, timebond*. Sementara itu, masih banyak rumus yang bisa digunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu masalah atau bukan, kebutuhan atau keinginan. Salah satu yang paling lumrah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan daya dukung organisasi adalah rumus *Strenght, Weakness, Opportunity* dan *Treatment* atau SWOT. Kita tidak mau (lagi) PHDI menggunakan “ilmu kira-kira” karena mencari ahli SWOT cukup banyak. Untuk bisa menggunakan rumus ajaib ini, PHDI sangat perlu melakukan pemetaan masalah secara komprehensif. Dalam bahasa penelitian, yang paling sederhana adalah rumuskan variabel, tentukan indikator, susun instrument, identifikasi masalah lalu menentukan pokok-pokok masalah.

Ketiga, pembiayaan dan anggaran. Dengan melakukan poin kedua di atas, dana yang dibutuhkan juga sesuai dengan peruntukannya. Tidak mudah memang karena poin ini menjadi masalah klasik yang seolah selalu gagal dilakukan PHDI selama ini. Umat sering bersungut karena PHDI tidak memiliki dana operasional, apalagi dana taktis dan dana abadi. Ada baiknya para ahli penghitung anggaran ikut turun tangan membantu *masterplan* rencana strategis (Renstra) PHDI jangka menengah dan panjang. Kita tidak mau (lagi) PHDI “miskin” anggaran, hingga harus bersusah payah menyelenggarakan Dharma Shanti Nasional, dll. “Program 1000 rupiah” tiap umat perlu dipertimbangkan kembali. Masalahnya, bagaimana mengelola dana umat yang bisa memuaskan kepercayaan umat secara akuntabel dan transparan. Memperkuat dan merevitalisasi Badan Dana Punia Nasional menjadi *urgent* untuk dilakukan.

Jika tiga hal pokok di atas belum bisa dipenuhi, sulit menyaksikan PHDI di masa kini dan esok bergerak lincah. Tidak seperti di masa lalu, umat Hindu di seluruh Indonesia kini haus untuk maju, bangkit dan bangga!

*Penulis, Antropolog IHDN
Denpasar